BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Penulisan Data e-KTP Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap kesalahan penulisan data e-KTP masih belum ada pengaturan norma tentang tindakan pemerintah secara aktif saat terjadi kesalahan pada e-KTP. Belum terlaksananya asas stelsel aktif yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, asas stelsel aktif menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan “semua stelsel aktif diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas”, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang masih menggunakan asas stelsel aktif yang diwajibkan kepada penduduk.
2. Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kesalahan penulisan data e-KTP saat ini menggunakan metode mencetak surat penegasan untuk memverifikasi bahwa data e-KTP yang bersangkutan telah berganti NIK (jika yang berubah adalah NIK), dan warga yang e-KTP nya masi dalam proses perbaikan data, Dispendukcapil Kota Malang memberi *printout database* yang dibubuhi stempel dari Dispendukcapil, yang akan bermanfaat sebagai bukti/verifikasi bahwa yang bersangkutan sudah punya dokumen namun secara

definitive belum selesai dicetak dokumennya, yang mana perbankan sudah bisa menerima identitas yang bersangkutan hanya dengan *printout database* tersebut.

B. Saran

1. Seharusnya ada peran aktif oleh pemerintah, yakni dengan membuat satu pengaturan norma tentang tindakan pemerintah secara aktif saat terjadi kesalahan pada e-KTP
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk segera melaksanakan asas yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Daftar Pustaka

Buku:

Mirriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, 1993, hlm. 41-45

C.S.T. Kansil, (dkk), Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1 (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 216

Ratminto & Atunarsih, Manajemen Pelayanan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.21.

SF. Marbun., Moh. Mahfud M. D, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm 6.

Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia *Indroduction to the Indonesian Administrative Law*, Gadhag Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm.25.

Philipus M. Hadjon, dkk, Loc Cit, hlm. 26.

Matra Ida Bagoes, Demografi Umum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm 93.

Achmad Ali, Bahan Kuliah: "Hukum Masyarakat dan Pembangunan", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2011.

Subuki Sahrianto, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Makassar Pada Penyelenggaraan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), hlm. 28.

Matra Ida Bagoes, 2000, Demografi Umum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 93

Peraturan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (1).

Internet:

http://sapa.kemendagri.go.id/fag/detil/1#.VHKHu2d_S58 Perubahan Substansi Yang Mendasar Dalam Perubahan UU No. 23 Tahun 2006, Diakses 22 September 2017, pukul 10.24 WIB.

www.e-ktp.com fungsi dan Kegunaan e-ktp, diakses 22 September 2017, pukul 10.27

<http://dispendukcapil.malangkota.go.id/home/>, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang,

diakses pada tanggal 16 Maret 2018, pukul 20:41 WIB